

3.1.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.15
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	5,00	1,1187	22,374	Sinergi dan kolaborasi bersama OPD pemungut retribusi dalam menggali potensi PAD dari sektor Retribusi	
						Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuato akses data kependudukan	
						Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga	
						Pembentukan Satgas OPAD PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan	
						Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
						Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.24
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,434	0,478	110,14	Memperkuat basis data pajak daerah dengan potensi kemampuan daerah	
						Meningkatkan intensifikasi pajak daerah dengan program peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah	
						Memperluas ekstensifikasi pajak daerah dengan peningkatan pendaftaran wajib pajak baru untuk memberikan stimulus peningkatan investasi daerah	
						Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan	
						Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor	
						Konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat secara berkala waktu	
						Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah	
						Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.4.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.38
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 3 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	(8,14)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang

				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	56,09	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tabel 3.44
Faktor Penghambat Kinerja IKSS 4

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,25	0,909	72,72	756.287.000	668.506.000	88,39	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota 2. Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah 3. Perlambatan struktur perekonomian daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah 4. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB 5. Kendaraan yang beroperasi dalam menjalankan usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan 6. Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah 7. Belum optimalnya update data kendaraan bermotor 8. Layanan pembayaran pajak daerah belum seluruhnya menyentuh titik layanan sampai ke tingkat pedesaan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.6.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.57
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Daerah	94,60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang

				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	56,09	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.7.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.67
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 6

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	93,198	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tabel 3.74
Faktor Penghambat Kinerja IKSS 7

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,96	0,682	71,04	300.000.000	257.345.430	85,78	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat secara intensif (kolaboratif) memberikan pengaruh terhadap penyaluran dana transfer pusat bisa terealisasi 3. Penyaluran dana bagi hasil pemerintah pusat dengan system <i>treasury deposit facility</i> cukup efisien <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru 2. Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan 3. Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal 5. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak daerah belum optimal 6. Belum optimalnya penggalan sumber potensi yang menjadi penerimaan Retribusi Daerah 7. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB memerlukan kebijakan equivalen dengan pembayaran pajak sesuai UU 28/2009 8. Belum optimalnya sinergi Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD) perairan dan daratan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

3.1.8.2.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.87
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	187,23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang

				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak	Jumlah Dokumen Keberatan	56,09	Menunjang

				Daerah	yang telah ditindaklanjuti		
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025